



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 18 /B.X/HK/2016**

#### **TENTANG**

#### **BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, perlu ditentukan besaran Uang Persediaan pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**
- KESATU : Besaran Uang Persediaan (UP) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Besaran Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi dasar dalam pelaksanaan dan pencairan anggaran yang meliputi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), maupun Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik Ganti Uang Persediaan (GU) maupun Tambah Uang Persediaan (TU).
- KETIGA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman Kepada Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 13 Januari 2016

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/ 18 /B.X/HK/2016  
 TANGGAL : 13 JANUARI 2016

**BESARAN UANG PERSEDIAAN (UP)  
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)  
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016**

| NO | KODE REKENING | SKPD                                                           | JUMLAH UP (Rp.) |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2             | 3                                                              | 4               |
| 1  | 1.01.01       | DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN                                | 4.000.000.000   |
| 2  | 1.02.01       | DINAS KESEHATAN                                                | 1.100.000.000   |
| 3  | 1.02.02       | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. Hi. ABDUL MOELOEK                  | 8.000.000       |
| 4  | 1.02.03       | RUMAH SAKIT JIWA DAERAH                                        | 250.000.000     |
| 5  | 1.03.01       | DINAS BINA MARGA                                               | 1.300.000.000   |
| 6  | 1.03.02       | DINAS PENGAIRAN DAN PERMUKIMAN                                 | 1.000.000.000   |
| 7  | 1.06.01       | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                           | 800.000.000     |
| 8  | 1.06.02       | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI DAERAH               | 350.000.000     |
| 9  | 1.07.01       | DINAS PERHUBUNGAN                                              | 750.000.000     |
| 10 | 1.08.01       | BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH                      | 400.000.000     |
| 11 | 1.11.01       | BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK             | 600.000.000     |
| 12 | 1.13.01       | DINAS SOSIAL                                                   | 400.000.000     |
| 13 | 1.14.01       | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI                            | 450.000.000     |
| 14 | 1.15.01       | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH                | 360.000.000     |
| 15 | 1.16.01       | BADAN PENANAMAN MODAL PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU          | 375.000.000     |
| 16 | 1.18.01       | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                                     | 400.000.000     |
| 17 | 1.19.01       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH                       | 300.000.000     |
| 18 | 1.19.02       | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                                     | 740.000.000     |
| 19 | 1.20.03.01    | BIRO TATA PEMERINTAHAN UMUM                                    | 160.000.000     |
| 20 | 1.20.03.02    | BIRO OTONOMI DAERAH                                            | 250.000.000     |
| 21 | 1.20.03.03    | BIRO HUKUM                                                     | 185.000.000     |
| 22 | 1.20.03.04    | BIRO PEREKONOMIAN                                              | 165.000.000     |
| 23 | 1.20.03.05    | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                                  | 180.000.000     |
| 24 | 1.20.03.06    | BIRO BINA SOSIAL                                               | 130.000.000     |
| 25 | 1.20.03.07    | BIRO BINA MENTAL                                               | 1.400.000.000   |
| 26 | 1.20.03.08    | BIRO UMUM                                                      | 2.500.000.000   |
| 27 | 1.20.03.09    | BIRO HUMAS DAN PROTOKOL                                        | 465.000.000     |
| 28 | 1.20.03.10    | BIRO KEUANGAN                                                  | 650.000.000     |
| 29 | 1.20.03.11    | BIRO PERLENGKAPAN DAN ASET DAERAH                              | 750.000.000     |
| 30 | 1.20.03.12    | BIRO ORGANISASI                                                | 180.000.000     |
| 31 | 1.20.04       | SEKRETARIAT DPRD                                               | 4.500.000.000   |
| 32 | 1.20.05       | DINAS PENDAPATAN DAERAH                                        | 1.000.000.000   |
| 33 | 1.20.06       | INSPEKTORAT PROVINSI                                           | 500.000.000     |
| 34 | 1.20.07       | BADAN PERWAKILAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG DI JAKARTA | 445.850.000     |

| NO | KODE REKENING | SKPD                                                                       | JUMLAH UP (Rp.) |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 2             | 3                                                                          | 4               |
| 35 | 1.20.08       | SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI PROVINSI LAMPUNG                         | 200.000.000     |
| 36 | 1.20.09       | SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH                              | 250.000.000     |
| 37 | 1.20.10       | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                                   | 500.000.000     |
| 38 | 1.20.11       | KANTOR SANDI DAERAH                                                        | 75.000.000      |
| 39 | 1.20.12       | PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA                                     | 500.000.000     |
| 40 | 1.20.13       | SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN | 550.000.000     |
| 41 | 1.20.14       | BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN DAERAH                                        | 700.000.000     |
| 42 | 1.20.15       | UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH                                  | 200.000.000     |
| 43 | 1.21.01       | BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH                                              | 320.000.000     |
| 44 | 1.22.01       | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA                        | 700.000.000     |
| 45 | 1.24.01       | BADAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH               | 280.000.000     |
| 46 | 1.25.01       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                                           | 550.000.000     |
| 47 | 2.01.01       | DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA                            | 750.000.000     |
| 48 | 2.01.02       | DINAS PERKEBUNAN                                                           | 320.000.000     |
| 49 | 2.01.03       | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                                       | 500.000.000     |
| 50 | 2.02.01       | DINAS KEHUTANAN                                                            | 600.000.000     |
| 51 | 2.03.01       | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI                                              | 650.000.000     |
| 52 | 2.04.01       | DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                       | 500.000.000     |
| 53 | 2.05.01       | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                                               | 1.000.000.000   |
| 54 | 2.06.01       | DINAS PERDAGANGAN                                                          | 380.000.000     |
| 55 | 2.07.01       | DINAS PERINDUSTRIAN                                                        | 400.000.000     |

GUBERNUR LAMPUNG,

  
M. RIDHO FICARDO